

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN KABUPATEN GOWA**

**APRILIANA SUKWAR
NIM 10573 04889 14**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN KABUPATEN GOWA**

**APRILIANA SUKWAR
NIM 10573 04889 14**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan teruntuk alm.

Ayahanda dan ibunda tercinta sebagai wujud bakti dan

kasih sayangku. Keluarga, sahabat serta orang-orang

yang sangat berarti dan selalu mendukung disetiap

kegiatanku.

MOTTO HIDUP

Tujuan hidup haruslah setinggi langit dimana semua

orang ingin menggapainya, bukan seperti tanah

dimana semua orang bisa menginjaknya. Jangan

menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggu

datangnya sayap. Yakinlah bahwa kalau kau mampu

untuk terbang sendiri.

“Lakukanlah apa yang paling kamu takutkan dalam hidupmu”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Apriliana Sukwar

Nomor Stambuk/NIM : 105730488914

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu 9 Februari 2019 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Februari 2019


Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dra. Lilly Ibrahim, SE., M.Si

NIDN: 2911194904



Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP

NIDN: 091515058801

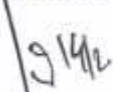
Mengetahui,

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078


Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP

NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **APRILIANA SUKWAR**, NIM: **10573 04889 14**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/2019, tanggal 04 Jumadil Akhir 1440 H/09 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Jumadil Akhir 1440 H
09 Februari 2019 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. 
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. 
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. 
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliaty, M.M. 
2. Linda Arisanti Razak, S.E., M.Si. Ak. 
3. Andi Arman, S.E., M.Si. Ak. CA. 
4. Naidah, S.E., M.Si. 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Apriliana Sukwar**
Nomor Stambuk/NIM : 105730488914
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : **Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya
Manusia terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Kabupaten Gowa.**

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian ini pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Apriliana Sukwar

Diketahui Oleh:

Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903078

Ketua Program Studi Akuntansi,

19/1/19

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

APRILIANA SUKWAR, Tahun 2018. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Lilly Ibrahim dan Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah hasil dari penyebaran kuesioner kepada seluruh SKPD Kabupaten Gowa bagian keuangan dengan populasi dan sampel sebanyak 40 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, (2) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

APRILIANA SUKWAR, 2018. *Effect of Understanding Government Accounting Standards and Competence of Human Resources on the Quality of Financial Statements of Gowa Regency*, Thesis Accounting Study Program Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Lilly Ibrahim and Ismail Badollahi.

This study aims to determine the effect of understanding of government accounting standards and human resource competencies on the quality of financial statements of Gowa Regency.

The type of research used in this study is quantitative descriptive research. The processed data is the result of distributing questionnaires to all SKPD of Gowa Regency in the financial division with the population and a sample of 40 respondents. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression.

The results of this study indicate that (1) understanding of government accounting standards has a significant positive effect on the quality of financial statements, (2) human resource competence has a significant positive effect on the quality of financial statements.

Keywords: *Understanding Government Accounting Standards, Human Resource Competencies, and Quality of Financial Statements.*

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Am. Bapak Sukri Sukardi dan Ibu Waryati yang telah membesarkan, melindungi dan mendidik penulis serta doa dan bimbingan dengan penuh kasih sayang yang mengalir sepanjang hidup. Sembah sujud kupersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur yang teramat dalam atas seluruh pengorbanan yang telah beliau. Dan tidak lupa ku ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,MSi,Ak.CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Lilly Ibrahim, SE.,M,Si., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,MSi,Ak.CA., selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan Skripsi hingga ujian Skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014. Terkhusus buat Akuntansi 7 angkatan 2014 terima kasih atas kebersamaannya menemaniku dalam suka dan duka. Semuanya tidak akan pernah terlupakan oleh penulis, terutama Sulfi, Ranita, Ranni, dan Tiyas.

9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, alm. Ayahanda Sukri Sukardi dan Ibunda Waryati yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkan penulis. Semoga ananda dapat membalas setiap tetes demi tetes keringat yang tercurah demi membimbing ananda menjadi manusia yang berguna untuk sesama. Tidak lupa pula saudara kembarku Apriliani Sukwar dan teman terbaikku Muh Akbar. H yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi S1 penulis.
10. Terima teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak terutama para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii sabilil haq, Fastabiqul Khairat, assalmualaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah	6
B. Kompetensi sumber Daya Manusia	11

1. Pengertian Kompetensi.....	11
2. Karakteristik Kompetensi	12
C. Kualitas Laporan Keuangan.....	17
1. Pengertian Laporan Keuangan.....	17
2. Tujuan Laporan Keuangan	18
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.....	20
D. Penelitian Terdahulu.....	25
E. Kerangka Pikir	29
F. Hipotesis	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Waktu dan Wilayah Penelitian	31
C. Definisi Operasional.....	31
D. Populasi dan Sampel	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum PEMDA Kabupaten Gowa	42
1. Visi dan Misi PEMDA Gowa	42
2. Tujuan PEMDA Gowa	43
3. Uraian Tugas PEMDA Gowa	44
4. Uraian Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)	53

5. Struktur Organisasi PEMDA Kabupaten Gowa	54
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	54
1. Karakteristik Responden	54
2. Pengujian Validitas	57
3. Pengujian Reliabilitas	59
C. Analisis Data	60
1. Uji Asumsi Klasik	60
2. Regresi Linear Berganda	62
3. Hasil Uji t	64
4. Hasil Uji F	66
5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R ²	66
D. Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1	Variabel Penelitian dan Indikatornya	32
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	56
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	56
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	57
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Validitas (X1)	58
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Validitas (X2)	58
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Validitas (Y)	58
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Reliabilitas	60
Tabel 4.9	Hasil Pengujian <i>Multikolinearitas</i>	61
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.11	Hasil Uji t	65
Tabel 4.12	Hasil Uji F	66
Tabel 4.13	Hasil Uji R	66

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas	61
Gambar 4.2	Hasil Uji Heterokedastisitas	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	74
2. Tabel <i>Frequency</i> Karakter Responden.....	77
3. Tabel <i>Frequency</i> Variabel Bebas	81
4. Tabel <i>Frequency</i> Variabel Terikat	84
5. Tabel <i>Output</i> Validitas	88
6. Tabel <i>Output</i> Realibilitas	89
7. Tabel <i>Output</i> Regresi Linear Berganda	90
8. Normalitas, Heterokedastisitas, dan Histogram	91
9. Surat Balasan Penelitian	93
10. Distribusi r Tabel	94
11. Distribusi t Tabel	95
12. Distribusi F Tabel	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting guna memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi pun harus mampu membuat laporan keuangan.

Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangannya sendiri. Selain adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sebagai pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah, proses penyusunan laporan keuangan juga harus dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu serta data-data yang dihasilkan dari laporan keuangan tersebut harus akurat.

Laporan keuangan sangat penting dalam suatu instansi pemerintahan atau organisasi tertentu karena dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan suatu keberhasilan instansi tersebut, laporan keuangan yang dibuat hendaknya harus berkualitas dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Wibawa: 2017).

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemahaman akan SAP sangat penting dalam pembuatan

laporan keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi. Sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem pengelompokan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan (Yuliani, 2010).

Menurut Isthika, dkk (2014), laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan ini, artinya organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas (Wibawa: 2017).

Penyusunan laporan keuangan juga diperlukan system akuntansi.

Dimana juga untuk menghasilkan laporan keuangan daerah atau system akuntansi keuangan daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan prosedur dari tahap awal pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Pemandagri No.59 Tahun 2007).

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji (Rahayu: 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang telah dipaparkan, maka peneliti menarik kesimpulan untuk mengangkat judul **“PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KAB. GOWA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pegawai yang memahami standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Gowa.

2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta dapat mengaplikasikan teori dan praktek.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Gowa dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

b. Manfaat Praktisi

1. Untuk mendapatkan pengalaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas

laporan keuangan

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Yuliani, dkk: 2010).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang baik yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk mewujudkan hal tersebut presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang disingkat dengan SAP, pada tanggal 13 Juni 2005. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyajian dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak pemerintah

daerah yang belum menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan (Lestari: 2014) .

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta: 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Yuliani, dkk: 2010)

Menurut kamus psikologi, kata pemahaman berasal dari kata *insight* yang mempunyai arti wawasan, pengertian pengetahuan yang mendalam. Jadi, arti dari *insight* adalah suatu pemahaman atau penilaian yang beralasan mengenai reaksi-reaksi pengetahuan atau kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki seseorang. bahwa pemahaman merupakan kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. Begitu pula dengan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, berarti kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu (Standar Akuntansi Pemerintahan), mempunyai wawasan dan pengertian pengetahuan yang mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (Sari, dkk: 2014).

Pemahaman akuntansi akan sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena seseorang yang bertugas membuat laporan keuangan yang berkualitas harus memahami akuntansi agar dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas (Wibawa: 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang telah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (Nugraeni: 2015).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi

pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Triwardana: 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah dikuatkan dalam PP No.24 Tahun 2005, SAP ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan (Inapty, dkk: 2016).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan suatu pedoman untuk akuntansi pemerintahan yang dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Dapat Memenuhi Persyaratan Undang-Undang Dasar dan Peraturan lain.
Akuntansi pemerintahan dirancang untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Undang–Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lain. Apabila terdapat dua pilihan yaitu untuk kepentingan efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan di sisi yang lain tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya.
- b. Dikaitkan dengan Klasifikasi Anggaran.
Sistem akuntan pemerintahan harus dikembangkan sesuai dengan klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah dan lembaga legislatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus saling melengkapi di dalam pengelolaan keuangan negara serta harus diintegrasikan.
- c. Perkiraan-Perkiraan yang Harus Diselenggarakan.
Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-

perkiraan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Perkiraan-perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas keuangan negara yang andal dari sisi objek dan tujuan penggunaan dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.

d. Memudahkan Pemeriksaan Oleh Aparat Pemeriksa.

Sistem akuntansi pemerintahan yang dikembangkan harus memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.

e. Sistem Akuntansi Harus Dikembangkan.

Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem akuntansi pemerintahan harus terus disesuaikan dan dikembangkan sehingga tercapai efisiensi, efektivitas, dan relevan.

f. Perkiraan-Perkiraan Harus Dikembangkan Secara Efektif.

Sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan perkiraan-perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan perubahan lingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan suatu program, pengukuran pendapatan, evaluasi belanja serta pendapatan surplus atau defisit anggaran.

g. Sistem Harus Dapat Melayani Kebutuhan Dasar Informasi Keuangan Guna Pengembangan, Rencana, dan Program.

Sistem akuntansi pemerintahan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi keuangan.

h. Pengadaan Suatu Perkiraan

Perkiraan yang dibuat harus memungkinkan analisis ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan perkiraan-perkiraan

nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintegrasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

1. Pengertian Kompetensi

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati, dkk: 2014).

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya

kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati (Andini :2015). Hutapea dan Toha (2008:4), ada beberapa definisi kompetensi yaitu:

a. Boyatzis (1982)

Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan”.

b. Woodruffle (1991) and Woodruffle (1990)

Mereka membedakan antara pengertian *competence* dan *competency* yang mana *competence* diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu menunjukkan “wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul”, sedangkan *competency* merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukkan “dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (*competent*)” .

2. Karakteristik Kompetensi

Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata. Penentuan ambang kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi, seleksi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM. Hutapea dan Thoha (2008:28), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan

perilaku individu (Andini).

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 58 tahun 2005, Kementerian Dalam Negeri yang membawahi pemerintah daerah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adanya perubahan peraturan tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, upaya perbaikan tersebut tampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah, karena pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan daerah dianggap masih kurang (Pratiwi: 2014).

2. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal.

Menurut (Rachmawati: 2014), faktor yang mempengaruhi keterampilan yaitu:

1. Pengetahuan.

Menurut Sunaryo (2004) pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata dan telinga terhadap obyek tertentu. *Waitress*, bar, kasir, *receptionist* dan koki harus memiliki pengetahuan tentang tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk membangun suatu keterampilan yang bagus. Dan pengetahuan juga memberikan pemahaman mengapa kita melakukan tindakan-tindakan tersebut dalam hubungannya dengan keterampilan yang akan dibangun oleh seorang karyawan.

2. Pengalaman

Pengalaman akan memperkuat kemampuan dalam melakukan sebuah tindakan (keterampilan). Pengalaman ini membangun seorang karyawan untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang telah diketahui. Semua tindakan yang pernah dilakukan akan direkam dalam bawah sadar mereka dan akan dibawa terus sepanjang hidupnya. Karyawan yang sering mendapat pengalaman melakukan pekerjaannya dengan baik akan menjadi sangat terampil dan tentunya akan lebih profesional, dibanding yang tidak pernah melakukan tindakan tersebut. Karena lamanya bekerja disuatu bidang akan memberikan suatu keterampilan yang semakin lama akan semakin baik. Karyawan yang terampil

tentunya akan berusaha melahirkan generasi penerus yang terampil pula, yang pada gilirannya nanti akan tercipta karyawan-karyawan yang terampil dan professional. Pengalaman kerja seseorang yang banyak, selain berhubungan dengan masa kerja seseorang juga dilatarbelakangi oleh pengembangan diri melalui pendidikan baik formal maupun informal.

3. Keinginan/motivasi.

Merupakan sebuah keinginan yang membangkitkan motivasi dalam diri seorang karyawan dalam rangka mewujudkan tindakan-tindakan tersebut. Motivasi inilah yang mendorong seorang karyawan bisa melakukan sebuah tindakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sementara Widayatun (2005) dalam bukunya Ilmu Perilaku mengatakan bahwa motivasi sebagai motor penggerak, maka bahan bakarnya adalah kebutuhan, sifatnyapun alami dalam rangka memenuhi kebutuhan seseorang guna mencapai tujuan. Yang semua itu terlebih dahulu didukung oleh pengetahuan karyawan tentang sebuah tindakan, yang diperkuat dengan pengalaman melakukan.

3. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Triwardana, 2017). Oleh karena itu, jika Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Untuk kedepannya agar kualitas laporan keuangan daerah tersebut menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien harus ditata ulang kembali manajemennya dengan SDM yang ahli dalam bidangnya yaitu lebih mengutamakan aparat-aparat pemerintah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi (Rahayu, L: 2014).

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten juga harus diimbangi dengan pemahaman akuntansi agar dapat menentukan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan tersebut (Wibawa: 2017). SDM yang berkompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan SDM pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Setyowati, L, dkk: 2016).

Menurut Suwanda (2013:141) kelemahan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah dan ketersediaan SDM yang memahami keuangan daerah khususnya sistem dan prosedur untuk pengelolaan keuangan daerah.
- b. Lemahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- c. Keengganan untuk menjadi pejabat pengelola keuangan.

C. Kualitas Laporan Keuangan.

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Basukianto : 2015). Menurut Suwanda (2013:91), laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan Keuangan Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Menurut Halim (2007), laporan keuangandaerah merupakan informasi yang memuat

data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu (Yuliani: 2016). Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi, sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeteren. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan (Wati, dkk: 2014).

2. Tujuan Laporan Keuangan.

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan, alat akuntabilitas publik, dan untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode (Setyowati L, dkk: 2016).

Menurut (Triwardana: 2017) secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi.

Secara umum tujuan akuntansi pemerintah adalah memberi jasa dan pelayanan kepada masyarakat (Renyowijoyo 2013: 27):

- a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, menyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan, dalam mencari pemecahan atau suatu masalah yang belum diatur dalam. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara rasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.

- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi pemerintah pusat serta keseluruhan.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang memiliki kriteria antara lain: kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (Setyowati: 2016).

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan SKPD yaitu:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang sama pentingnya dengan pekerjaan itu sendiri, mengingat pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau perusahaan, SDM sebagai factor penentu organisasi, maka kompetensi menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dengan Kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan tentu hal ini akan menentukan kualitas SDM yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Basukianto: 2015).

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2003) Kompetensi

adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri tersebut melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien (Fadhil: 2016).

2. Teknologi Informasi

Peran sistem teknologi informasi telah banyak bergeser sejak dari awal perkembangannya. Mulai dari perkembangannya untuk efisiensi, yaitu untuk menggantikan manusia dengan teknologi informasi yang lebih efisien sampai keperannya untuk keefektifan, yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Saat ini peran sistem teknologi informasi tidak hanya untuk efisiensi dan keefektifan, tetapi sudah menjadi senjata bersaing (*competitive weapon*) yang ampuh untuk memenangkan persaingan (Jogiyanto: 2011).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan. Teknologi Informasi merupakan alat yang digunakan

individu dalam penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak dan data) dan penggunaan jasa pendukung (training, misalnya) yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi (Basukianto: 2015)

3. Peran PPK-SKPD

Menurut PP 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai tugas yaitu:

1. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. menyiapkan SPM;
4. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)). Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari-hari sama yaitu PPK. Istilah PPK-SKPD tidak dikenal dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Istilah PPK-SKPD hanya terdapat pada PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya. Tugas dan wewenang PPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa .

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, antara lain: melaksanakan akuntansi SKPD; menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (Basukianto: 2015).

4. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilakukan antara Satuan Kerja dan KPPN setiap bulan dengan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh Pejabat penanggungjawab rekonsiliasi atas nama Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Seksi yang menangani Akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-/PB/2009 tentang

Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara, rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan (Basukianto: 2015).

5. Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Menurut Ruchijat (2010:2) sistem pengendalian intern pemerintah adalah “Sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel” Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian intern pemerintah adalah “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai”. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (Basukianto: 2015).

D. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaanya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Secara keseluruhan, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa informasi dan efek penguatan berubah-ubah, yang mengisyaratkan perlunya membedakan antara informasi yang tersedia dan penguatan aktual yang diembankan kepada pegawai. Mereka juga menunjukkan bahwa kontrol aktifitas dan kontrol kecakapan memiliki efek yang berbeda-beda dan menggambarkan pembedaan yang tajam antara dua jenis kontrol perilaku. Akhirnya hasil tersebut menunjukkan bahwa peran pemimpin (supervisor) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah telah banyak yang dilakukan antara lain:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil
Lilis Setyowati, dkk. (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <ol style="list-style-type: none"> 1. variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2. kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan 3. peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Komang Agus Sadu Wibawa, dkk. (2017)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng.	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 2. Pemahaman akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 3. Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, 4. Pemanfaatan

			<p>sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,</p> <p>5. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan</p> <p>6. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
Dhedy Triwardana (2017)	<p>Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)</p>	<p>Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Statistik deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan signifikansi 0,003, penerapan sistem keuangan akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan 0,000 signifikansi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan SKPD dengan signifikansi 0,000. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa koefisien R square adalah 94,1%. Setiap variabel independen, memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen, itu</p>

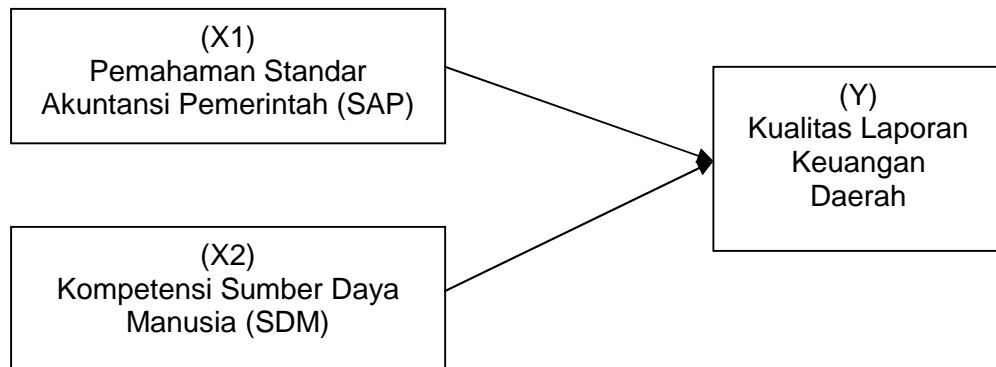
			berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Semua variabel juga memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen dalam penelitian ini.
Dewa Gede Candra Wirawan (2016)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengalaman Kerja dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Bangli.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan, dan (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan.

Lisa Rahayu (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)	Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda	Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi, Sistem Akuntansi Publik, dan Standar Akuntansi Publik berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Publik.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Faktor-faktor tersebut yaitu Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan kabupaten gowa dapat disederhanakan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (*independent variable*) adalah pemahaman standar akuntansi pemerintah (SAP), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

F. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Di duga Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H2: Di duga Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey, dimana penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada SKPD Kabupaten Gowa. Sedangkan waktu penelitian dilakukan berdasarkan lamanya penelitian yang dilakukan, yaitu mulai dari pengusulan judul penelitian, survey lapangan, penulisan proposal, pengumpulan, dan pengolahan data hingga perampungan hasil penelitian yang membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan, dimulai pada bulan April sampai dengan Mei 2018.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tertentu di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.

Variabel bebas (independen) terdiri dari dua variabel yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dan variabel terikat (dependen) terdiri dari satu variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TABEL 3.1
VARIABEL PENELITIAN DAN INDIKATORNYA

Variabel	Indikator	Item	Sumber
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1)	Kemampuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menjalankan fungsi laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. 2. Kemampuan diri dalam mengerti dan mengetahui dengan benar terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. 	Sari, dkk (2014)
	Berwawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. 	Sari, dkk (2014)
	Kepandaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pemahaman akuntansi adalah pegawai yang mengerti benar tentang akuntansi. 2. Mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan. 	Yuliani, dkk (2010).
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Pengetahuan yang 	Pratiwi (2014)

Variabel	Indikator	Item	Sumber
		cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan.	
	Keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> Motivasi yang mendorong seorang pegawai bisa melakukan sebuah tindakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Pengalaman akan memperkuat kemampuan dalam melakukan sebuah tindakan. 	Rachmawati (2014)
	Sikap/perilaku	<ol style="list-style-type: none"> Pola tingkah laku seorang pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 	Rachmawati (2014)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. SDM sebagai faktor penentu organisasi. 	Basukianto (2015)
	Teknologi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> Sistem computer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi. 	Basukianto (2015)
	Peran PPK-SKPD	<ol style="list-style-type: none"> Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Pejabat 	

Variabel	Indikator	Item	Sumber
		penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)).	Basukianto (2015)
	Rekonsiliasi	1. salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. 2. Proses pencocokan data transaksi keuangan.	Basukianto (2015)
	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	1. Pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. 2. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Basukianto (2015)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Sugiyono (2012: 215) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Nooh dkk, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Gowa sebanyak 40 SKPD.

2. Sampel

Sugiyono (2015: 118) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling jenuh, yang termasuk dalam teknik *non probability sampling*. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Gowa sebanyak 40 SKPD

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah, maka teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Penelitian Pustaka (*Library Research*), merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan kunjungan langsung pada objek penelitian. Untuk mendapat data lapangan ini digunakan teknik:

a. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menelaah dan mengkaji dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh

perusahaan yang bersangkutan.

b. Kuesioner

Metode Kuesioner, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada pihak-pihak yang terkait (responden) untuk dijawab.

Adapun untuk menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan uji instrument sebagai berikut:

1) Uji Validitas

Menurut Ghozali (2009:125) Uji Validitas adalah suatu pengujian data agar dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan atau tidak. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam rangka mengetahui uji validitas sapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikasinya lebih kecil dari 5% (*Level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah/valid sebagai pembentuk indikator.

2) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai pengumpulan data karena instrumen

tersebut sudah baik. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel yang diamati. Koefisien reliabilitas diketahui dari besarnya koefisien alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* $> 0,6$ Ghozali (2009: 137).

F. Teknik Analisis

1. Analisis Data Kualitatif

Analisis Data Kualitatif merupakan analisis data yang berbentuk penjabaran non statistic dengan menggunakan penalaran berdasarkan teori yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Proses analisis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pengeditan (*editing*)

Pengeditan (*editing*) adalah memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu, untuk memudahkan perhitungan dalam pengujian hipotesa.

b. Pemberian Skor (*scoring*)

Mengubah data yang bersifat kualitatif kedalam bentuk kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* (1-5).

c. Tabulasi (*tabulating*)

Pengelompokan data atas jawaban dengan benar dan teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai berwujud dalam bentuk yang berguna. Berdasarkan hasil tabel tersebut akan disepakati untuk membuat data tabel agar mendapatkan hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang ada.

2. Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi dasar yang menghasilkan estimator linier tidak biasa yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa dalam penggunaan regresi. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataannya.

Asumsi-asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:111)

1. Jika data berada disepanjang garis dan bergerak searah dengan garis diagonal maka data dapat dikatakan terdistribusi normal.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*Independen*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi maka akan digunakan penilaian *Variance Inflation Factor* (VIF) atau *Tolerance Value*. Model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas apabila nilai *tolerance* 0,10 dengan nilai VIF 10 (Kinarsih: 2013).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2009: 141).

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antar prediksi *variabel dependen* (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola titik pada grafik *scatterplot* antara SPRESID dan ZPRED, sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual yang telah di-standardized. Dasar analisisnya sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Analisis Data Kuantitatif

Analisis Data Kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka-angka, analisis ini meliputi pengolahan

data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Menurut Sugiyono (2014:277) analisis regresi berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel *dependen* (kriterium), bila dua atau lebih variabel *independen* sebagai factor prediator dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan menggunakan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Nilai konstanta

b = Koefisien regresi

X1 = Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah

X2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

e = Kesalahan regresi (*regression error*)

4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan yaitu Uji parsial (Uji-t). Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan) secara terpisah atau parsial.

Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:

$H_0: \beta_1=0$, variabel bebas (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kualitas Laporan Keuangan).

$H_1: \beta_1 \neq 0$, variabel bebas (Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kualitas laporan Keuangan).

Dasar pengambilan keputusan:

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Versi 22, dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. Apabila angka probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Apabila angka probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PEMDA Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. Kabupaten yang terletak pada bagian selatan dari Sulawesi selatan ini merupakan daerah otonom, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Sulsel. Dibagian utara berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten Maros. Disebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng. Disebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan dibagian baratnya dengan kota Makassar dan Takalar.

1. Visi dan Misi PEMDA Gowa

Visi :

Visi yang ingin dicapai PEMDA Gowa, Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

Misi :

Misi yang diusung PEMDA Gowa adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sector.
 4. Meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan
 5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis
2. Tujuan PEMDA Gowa

Rapat Koordinasi dan Evaluasi Realisasi Anggaran Triwulan Pertama (Tepra) Pemerintah Kabupaten Gowa resmi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H Muchlis, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa. Kegiatan yang digelar oleh Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) ini, diikuti oleh Para Pimpinan SKPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Kabag Perekonomian Firdaus menuturkan, tujuan kegiatan ini untuk mengetahui terlaksananya pengawasan terhadap penyerapan realisasi anggaran, serta tercapainya target realisasi anggaran di Kabupaten Gowa untuk tahun anggaran 2018."Rapat ini untuk mengetahui, sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD Kabupaten Gowa di unit kerja setiap SKPD," jelas Firdaus.

Sementara, H Muchlis mengatakan, rapat evaluasi adalah ukuran bagi setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dalam menetapkan target atau pencapaian kinerja masing masing di triwulan pertama di SKPD nya. "Evaluasi ini menjadi acuan agar pada saat proses pelaksanaan program kegiatan, mampu terselesaikan secara terorganisir. Sehingga,

bisa berjalan dengan sebaik - baiknya sesuai dari target yang direncanakan di setiap SKPD," ujarnya.Selain itu, Sekda juga mengingatkan kepada seluruh SKPD terkait hal yang perlu menjadi perhatian serius dalam pencapaian target pembangunan di setiap triwulannya, dengan memperhatikan percepatan pelaksanaan program.Sehingga, tidak terjadi keterlambatan pelaporan dalam prosesnya.Di akhir sambutannya, dia berharap kiranya setiap unit kerja yang telah mencapai angka ideal dalam pelaksanaan kegiatan, untuk lebih meningkatkan pencapaiannya.Sehingga, mampu diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.

3. Uraian Tugas PEMDA Gowa

Menurut peraturan Bupati Gowa, Nomor: 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa.

Pasal 21

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:

- a. Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan
- b. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
- c. Sub Bagian Sante

Pasal 22

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan protokol meliputi peliputan dan pemberitaan, protokol dan perjalanan serta sandi telekomunikasi.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - b. Penyelenggaraan program kerja Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi tugas Kepala Sub Bagian lingkup Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat dan protokol sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
 - d. Membina hubungan dengan lembaga profesi kewartawanan;

- e. Mengoreksi dan memaraf konsep Press Release, termasuk hasil kliping berita dan mengatur pendistribusiannya secara periodik sebagai bahan informasi untuk instansi terkait maupun masyarakat luas, konsep surat dan laporan lainnya sesuai dengan kewenangannya;
- f. Mengkoordinasikan pemberitaan-pemberitaan yang memuat berita di mas media yang dapat merawankan, meresahkan masyarakat umum;
- g. Menyiapkan bahan bimbingan dan memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan dengan para wartawan atau jumpa pers, organisasi kemasyarakatan lainnya secara berkala sesuai dengan kebutuhan;
- h. Mengkoordinasikan dan menginformasikan agenda kegiatan dan perjalanan Pemerintah Daerah serta menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan, mengumpulkan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian secara rutin dan insidentil berdasarkan data dan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas peliputan dan pemberitaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan peliputan dan pemberitaan;

- c. Menyiapkan bahan bimbingan, melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan pemberitaan dan peliputan serta penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan, mengumpulkan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
- e. Mengatur akomodasi penerimaan, pengawalan dan acara perjalanan tamu negara dan daerah;
- f. Menyiapkan acara dan jadwal perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Kabupaten;
- g. Menyiapkan dan mengatur pelaksanaan acara-acara Pemerintah Daerah, upacara-upacara, keprotokolan, berikut koordinasi peliputannya;
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Menyiapkan acara penyelenggaraan upacara pelantikan, rapat dinas dan pertemuan lainnya;
- j. Mengkoordinir wartawan/koresponden yang akan meliput kegiatan kegiatan Pemerintah Daerah;
- k. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan, mendokumentasikan naskah pidato/ sambutan Bupati serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
- l. Menilai prestasi kerja staf dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian protokol dan perjalanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Sub Bagian Protokol dan Perjalanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Sub Bagian Protokol dan Perjalanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan keprotokoleran dan

- perjalanan;
- c. Melakukan penyiapan bahan dan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang keprotokoleran dan perjalanan dinas sebagai pedoman landasan kerja;
 - d. Mengendalikan kegiatan administrasi dan sarana serta prasarana yang ada pada Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - e. Memfasilitasi pimpinan Sekretariat Daerah dalam hal pelaksanaan koordinasi perjalanan;
 - f. Melayani, menjemput dan mengatur perjalanan Pimpinan Sekretariat Daerah di dalam maupun diluar gedung Sekretariat Daerah;
 - g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - h. Memantau jalannya kegiatan keprotokoleran meliputi urusan pelaksanaan acara dan perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten;
 - i. Memelihara sarana dan prasarana pada Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
 - k. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

- (1) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas sandi telekomunikasi
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penerimaan dan pengiriman sandi dan telekomunikasi dan melaksanakan pencatatan segala kegiatan persandian, telekomunikasi, termasuk pencatatan

- berita/radiogram yang bersifat rahasia untuk diserahkan kepada petugas sandi;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi serta melakukan pencatatan/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari Provinsi dan Pusat dan mendistribusikannya;
 - d. Melaksanakan Pemeliharaan alat-alat sandi dan telekomunikasi, pengamanan terhadap informasi serta pengamanan terhadap administrasi informasi santel dan dokumen alat-alat sandi serta pengembangan sistem dan alat-alat sandi;
 - e. Membina kemampuan personil sandi dan telekomunikasi, termasuk kesejahteraan petugas santel;
 - f. Menyelenggarakan pengaturan teknis operasional sarana komunikasi dan melakukan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kelancaran hubungan sandi;
 - g. Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dapat diakses secara cepat dan akurat serta melakukan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi secara elektronik;
 - h. Melaksanakan kajian di Bidang Sistem Informasi dan Telematika serta melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan;
 - i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

- dengan Bidang Santel serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Uraian Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilannya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM
 - e. Melakukan verifikasi SPJ;
 - f. Melaksanakan akuntansi dinas;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas;
 - h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas secara berkala setiap bulan sekali;
 - i. Membuat register SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran;
 - j. Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna

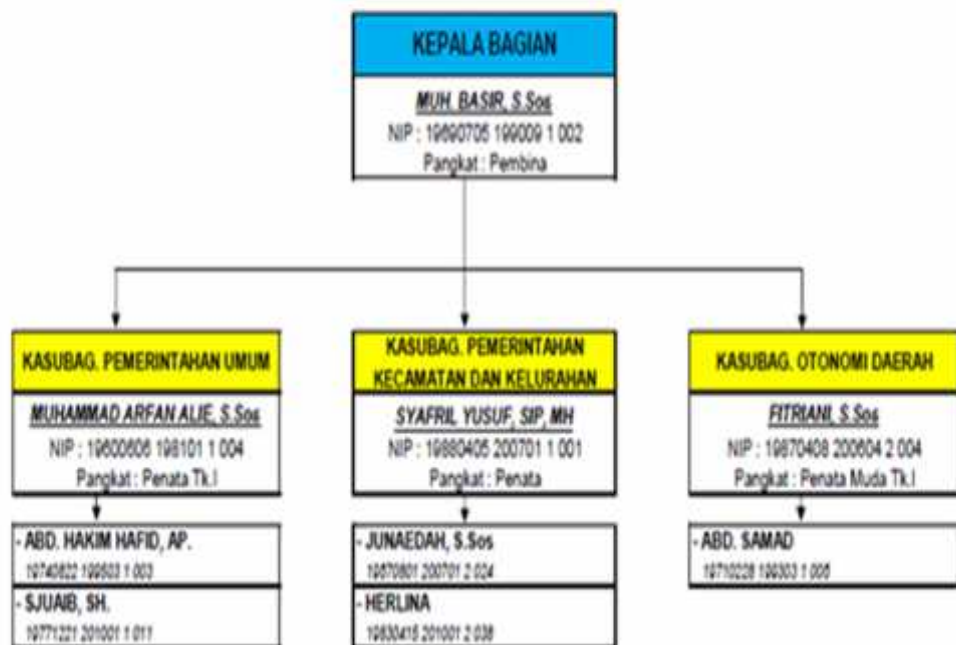
Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran;

k. Membuat register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna

Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran.

5. Struktur Organisasi PEMDA Kabupaten Gowa

**STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KAB. GOWA
BERDASARKAN PERDA NO. 11 TAHUN 2016**



B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini menguraikan Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Dalam penelitian ini, diambil sampel sebanyak 40 SKPD pada Kabupaten Gowa.

Karakteristik responden yaitu menguraikan deskripsi identitas responden menurut sampel penelitian yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan dengan deskripsi karakteristik responden adalah member gambaran yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Karakteristik responden dalam penelitian ini, dikelompokkan menurut tingkat pendidikan dan lama bekerja. Oleh karena itu, uraian mengenai karakteristik responden dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase
Laki-laki	17	42,5%
Perempuan	23	57,5%
Jumlah	40	100%

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.1 (Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin), menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 23 orang atau 57% dan yang paling sedikit menjadi responden yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 17 orang atau 42,5%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
SMA	1	2,5%
S1	28	70%
S2	11	27,5%
Jumlah	40	100%

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.2 (Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan), menunjukkan bahwa responden yang memiliki pendidikan S1 merupakan yang paling banyak menjadi responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 28 orang atau 70%, responden yang memiliki pendidikan S2 berjumlah 11 orang atau 27,5%, sedangkan responden yang paling sedikit yaitu yang memiliki pendidikan SMA, terdiri dari 1 orang atau 2,5%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Presentase
Bendahara	10	25%
Bendahara Pengeluaran	7	17,5%
Kasubag Keuangan	16	40%
Staf Keuangan	7	17,5%
Jumlah	54	100%

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 (Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan), menunjukkan bahwa responden yang memiliki jabatan sebagai kasubag keuangan merupakan yang paling banyak menjadi

responden dalam penelitian ini yaitu 16 orang atau 40%, responden yang memiliki jabatan sebagai bendahara yaitu 10 orang atau 25%, responden yang memiliki jabatan sebagai bendahara pengeluaran yaitu 7 orang atau 17,5%, responden yang memiliki jabatan sebagai staf keuangan yaitu 7 orang atau 17,5%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Presentase
10 Tahun	5	12,5%
12 Tahun	2	5%
13 Tahun	2	5%
15 Tahun	3	7,5%
18 Tahun	1	2,5%
2 Tahun	1	2,5%
20 Tahun	5	12,5%
21 Tahun	1	2,5%
22 Tahun	1	2,5%
23 Tahun	1	2,5%
30 Tahun	1	2,5%
32 Tahun	2	5%
4 Tahun	1	2,5%
5 Tahun	4	10%
6 Tahun	1	2,5%
7 Tahun	3	7,5%
8 Tahun	5	12,5%
9 Tahun	1	2,5%
Jumlah	40	100%

Sumber: data diolah tahun 2018

2. Pengujian Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji ketepatan alat pengukur, dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan/ pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat digunakan koefisien korelasi yang nilai signifikannya lebih kecil dari 5% (*level of significance*) menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan tersebut sudah sah/valid sebagai pembentuk indikator. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Validitas (X1)

Variabel	Indikator	r hitung	Sig	(0,05)	Ket.
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	X1.1	0,940	0,000	0,05	Valid
	X1.2	0,839	0,000	0,05	Valid
	X1.3	0,940	0,000	0,05	Valid
	X1.4	0,940	0,000	0,05	Valid
	X1.5	0,631	0,000	0,05	Valid

Sumber: data diolah tahun 2018

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Validitas (X2)

Variabel	Indikator	r hitung	Sig	(0,05)	Ket.
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	X2.1	0,536	0,000	0,05	Valid
	X2.2	0,798	0,000	0,05	Valid
	X2.3	0,609	0,000	0,05	Valid
	X2.4	0,790	0,000	0,05	Valid
	X2.5	0,790	0,000	0,05	Valid

Sumber: data diolah 2018

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Validitas (Y)

Variabel	Indikator	r hitung	Sig	(0,05)	Ket.
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y1	0,572	0,000	0,05	Valid
	Y2	0,711	0,000	0,05	Valid
	Y3	0,762	0,000	0,05	Valid
	Y4	0,759	0,000	0,05	Valid
	Y5	0,536	0,000	0,05	Valid
	Y6	0,536	0,000	0,05	Valid

	Y7	0,726	0,000	0,05	Valid
	Y8	0,772	0,000	0,05	Valid
	Y9	0,771	0,000	0,05	Valid
	Y10	0,772	0,000	0,05	Valid

Sumber: data diolah 2018

Berdasarkan tabel 4.3, 4.4, 4.5 diatas, menunjukkan bahwa semua item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} atau $Sig > 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan indikator adalah valid untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti (Ghozali, 2009: 125).

3. Pengujian Realibilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian realibilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *alpha*. Hasil pengujian realibilitas untuk masing-masing variabel diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Nilai Hitung Alpha Cronbach	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	0,906	Realibel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,744	Realibel
Kualitas Laporan Keuangan(Y)	0,876	Realibel

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki koefisien *cronbach alpha* di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pengukur variabel dan kuesioner adalah *realible* yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

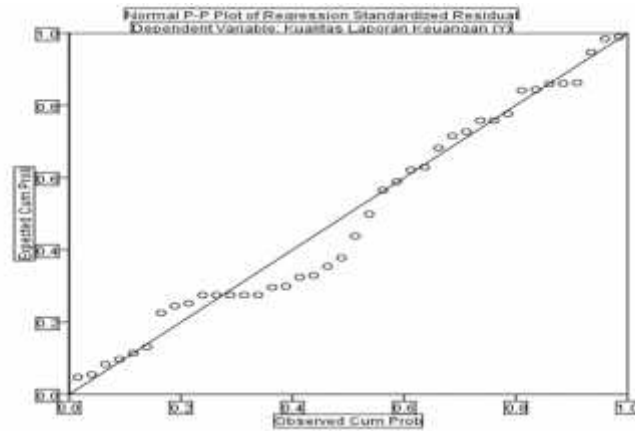
Koefisien reliabilitas diketahui dari besarnya koefisien alpha (). Suatu variabel dikatakan realibel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 Ghozali (2009: 137).

C. Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui model telah memenuhi asumsi *BLUE* (*Best linier unbiased estimator*) atau tidak, maka perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu uji *multikolinearitas*, uji *heteroskedastisitas* dan uji normalitas.

a. uji normalitas



Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan analisis kurva pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar diagram dan mengikuti regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:111).

b. Uji *multikolinearitas*

Tabel 4.9
Uji Multikolinearitas

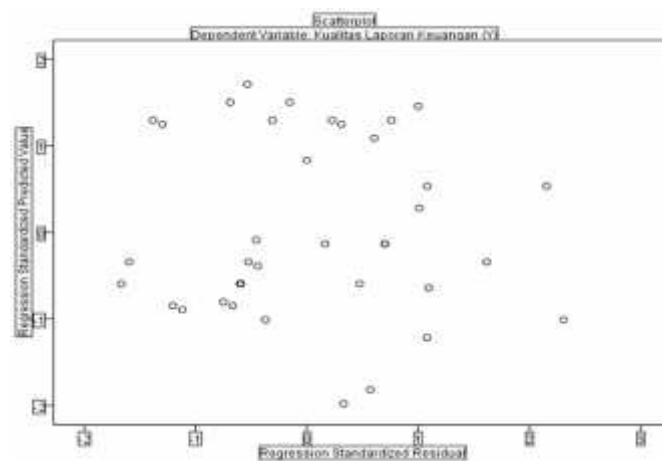
Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,359	2,788	Bebas <i>multikolinearitas</i>
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	0,359	2,788	Bebas <i>multikolinearitas</i>

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa semua nilai VIF 10 ini berarti tidak terjadi *multikolinearitas*, sehingga dapat disimpulkan bahwa uji *multikolinearitas* terpenuhi.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi maka akan digunakan penilaian *Variance Inflation Faktor* (VIF) atau *Tolerance Value*. Model regresi dikatakan mengalami multikolinearitas apabila nilai *tolerance* 0,10 dengan nilai VIF 10 (KInarsih: 2013).

c. Uji *Heteroskedastisitas*



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.2 diatas dapat diketahui bahwa tidak terjadi *heteroskedastisitas* sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan uji *heteroskedastisitas* terpenuhi.

2. Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda bertujuan untuk menganalisis Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 22 for windows, sedangkan tingkat kepercayaan yang digunakan dalam perhitungan regresi linear berganda adalah 5% atau dengan tingkat signifikansi 0,05 (= 0,05).

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.581	3.069		3.121	.003
X1	.867	.204	.548	4.252	.000
X2	.710	.240	.381	2.954	.005

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.4 (hasil perhitungan regresi linear berganda) diatas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 9,581 + 0,867X_1 + 0,710X_2$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai *constan* (a)= 9,581

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar 9,581 atau dengan kata lain variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) akan konstan sebesar 9,581 jika tidak dipengaruhi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2).

- b. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)/ $b_1 = 0,867$

Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,867, ini berarti jika variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah mengalami kenaikan satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan akan naik sebesar 0,867, sebaliknya jika variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah menurun maka Kualitas Laporan Keuangan menurun pula dengan asumsi bahwa variabel bebas lain (X_1) = 0.

- c. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)/ $b_2 = 0,710$

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,710, ini berarti jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia mengalami kenaikan satu satuan maka Kualitas Laporan Keuangan akan naik sebesar 0,710, sebaliknya jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia menurun maka Kualitas Laporan Keuangan menurun pula dengan asumsi bahwa variabel bebas lain (X_2) = 0.

3. Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi variabel X terhadap Y secara parsial. Sampel yang digunakan sebanyak 40 orang, sehingga pengujian menggunakan uji t dengan $df = n-2$ atau $df = 38$ orang, dan tingkat signifikansi (α) = 5% maka diperoleh t_{table} sebesar 2.02439.

Tabel 4.11
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9.581	3.069		3.121	.003
	X1	.867	.204	.548	4.252	.000
	X2	.710	.240	.381	2.954	.005

Sumber: data diolah tahun 2018

- a) Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pada perhitungan *SPSS (Statistical Package for Social Science)* dapat dilihat bahwa t_{hitung} variabel Standar Akuntansi Pemerintah (4,252) $> t_{tabel}$ (2.02439) dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu 0,000, sehingga H_1 yang berbunyi variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima. Artinya jika semakin tinggi Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah maka Kualitas Laporan Keuangan juga akan semakin tinggi.

- b) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pada perhitungan *SPSS (Statistical Package for Social Science)* dapat dilihat bahwa t_{hitung} variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (2,954) $> t_{tabel}$ (2.02439) dan nilai signifikan $< 0,05$ yaitu 0,005, sehingga H_1 yang berbunyi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan diterima. Artinya

bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa dapat menjamin Kualitas Laporan Keuangan..

4. Hasil Uji F

Tabel 4.12
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	456.084	2	228.042	65.399	.000 ^b
	Residual	129.016	37	3.487		
	Total	585.100	39			

Sumber: data diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi linear berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 65,399 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,5 dimana nilai F hitung 65,399 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,24 maka ini berarti realibel.

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Tabel 4.13
Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883 ^a	.779	.768	1.86733	2.048

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas diketahui nilai R² sebesar 0,779, hal ini berate bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 77,9%.

D. Pembahasan

Setelah melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya yaitu membahas hasil data yang telah diperoleh tentang pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut:

a. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t untuk pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah t_{hitung} variabel pemahaman standar akuntansi Pemerintah (4,252) > t_{tabel} (2.02439) dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa SKPD Kabupaten Gowa mempengaruhi Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan sehingga Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sesuai dengan tingkat pemahaman yang di peroleh.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dewa Gede Candra Wirawan (2016) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Hal ini sesuai juga dengan hasil penelitian Lilis Setyowati, dkk. (2016) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji t untuk pengaruh kompetensi sumber daya

manusia memiliki t_{hitung} variabel kompetensi sumber daya manusia (2,954) $> t_{tabel}$ (2.02439) dan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya SKPD Kabupaten Gowa mempunyai Kompetensi Sumber Daya Manusia yang handal dan tidak diragukan lagi kinerjanya.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lisa Rahayu (2014) kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Publik.

Hal ini sesuai juga dengan Hasil Penelitian Komang Agus Sadu Wibawa, dkk.(2017) Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Gowa. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Variabel Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan atau dapat dikatakan bahwa Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
2. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan atau dapat dikatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV dan dari penarikan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan pertimbangan SKPD Kabupaten Gowas ebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah daerah agar melakukan evaluasi secara berkesinambungan mengenai pemahaman akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu

perlunya pelatihan berkala kepada segenap staf yang menangani keuangan agar nantinya pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas.

2. Bagi seluruh staf SKPD Kabupaten Gowa di harapkan agar lebih meningkatkan kinerja sehingga tercapai Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
3. Bagi pejabat penatausahaan keuangan SKPD Kabupaten Gowa diharapkan dapat tetap mempertahankan kinerjanya sehingga dalam membuat laporan keuangan bisa lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D, Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empang Lawang Sumatera Selatan*, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol 24 No. 1, (<http://www.jurnalkiatuir.com>, di akses pada tanggal 23 Maret 2018).
- Basukianto, F.C.P. 2015. *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 22, No. 2, (<https://media.neliti.com>, di akses pada 23 Maret 2018).
- Fadhil. M. 2016. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar*, p-ISSN: 2355-0538 Vol. 01, No. 01, (<http://download.portalgaruda.org>, di akses pada tanggal 20 Maret 2018).
- Inapty M.A.F.B.A, Martini RR.S.P. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan*, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 9 (1), (<http://journal.uinjkt.ac.id>, di akses pada tanggal 22 Februari 2018).
- Jogiyanto, Abdillah, W. 2011. *Sistem Tatakelola Teknologi Informasi*. Edisi 1. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Lestari P.D, dkk. 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Penyajian Laporan Keuangan (Studi Pada 15 Dinas Kabupaten Badung)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 2 Nomor 1, (<http://download.portalgaruda.org>, di akses pada tanggal 20 Maret 2018).
- Nugraeni, Budiantara, M. 2015. *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja*, JDEB: Vol. 12 No. 1, (<https://ejournal.unisnu.ac.id>, di akses pada tanggal 22 Februari 2018).
- Pratiwi P.A.S.A, dkk. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah, Personal Background, dan Komitmen Terhadap Kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD di Pemerintahan daerah Kabupaten Klungkung)*, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, Vol. 2 No. 1, (<https://ejournal.undiksha.ac.id>, di akses pada tanggal 23 April 2018).

- Rahayu L. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)*, JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2, (<https://media.neliti.com>, di akses pada tanggal 17 Maret 2018).
- Rachmawati, F. 2014. *Pengaruh Lingkungan Kerja dan Jenjang Karir Terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3 No. 8. (<http://repository.upy.ac.id>, di akses pada tanggal 19 Maret 2018).
- Renyowijoyo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3 Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Rovianyantie, Devi. 2011. *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)*. Jurnal Accounting. Vol1, No. 1. (<https://media.neliti.com>, di akses 12 februari 2018)
- Saputra.B.W. 2015. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Pekan baru)*. JOM. FEKON Vol. 2 No. 2, (<https://media.neliti.com>, di akses pada tanggal 21 Maret 2018)
- Sari.N.P.Y.M.M, dkk. 2014. *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 2 No. 1, (<http://download.portalgaruda.org>, di akses pada tanggal 21 maret 2018).
- Setyowati, L, dkk. 2016. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*, KINERJA, Volume 20, No.2, (<https://media.neliti.com>, di akses pada tanggal 21 Maret 2018)
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sujana, E. dkk. *Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada dinas-dinas di pemerintah kabupaten jembrana)* e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume. 2 No.1, (<http://download.portalgaruda.org>, di akses pada tanggal 20 April 2018).

- Suwanda, D. 2013. *Laporan Keuangan PEMDA*. Edisi 2 PPM Manajemen: Jakarta Pusat.
- Triwardana, D. 2017. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar)* JOM Fekon Vol. 4 No. 1, (<https://media.neliti.com>, di akses pada tanggal 21 april 2018).
- Wati, K.D, dkk. 2014. *Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP,dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah*. E-Journal Vol 2 No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha: Singaraja. (<http://download.portalgaruda.org>, di akses pada tanggal 10 Februari 2018).
- Wibawa, K.A.S, dkk. 2017. *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng*, e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol: 2 No: 8, (<https://media.neliti.com>, di akses pada tanggal 23 Maret 2018).
- Wirawan, D.G.C, 2016. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengalaman Kerja dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Bangli*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol 4 No.2, (<http://download.portalgaruda.org>, di akses pada tanggal 23 Maret 2018).
- Yuliani.S, dkk. 2010. *Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada pemerintah Kota Banda Aceh)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol 3. No. 2 Hal. 206-20. (<https://media.neliti.com>, di akses pada tanggal 15 februari 2018).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih atas kesediaan bapak/ibu/saudara(i) untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian yang sedang saya laksanakan. Daftar pernyataan yang ada pada kuesioner ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kab. Gowa”**.

IDENTITAS RESPONDEN

Isilah Biodata Anda dibawah Ini

Nama :

Jenis Kelamin : **Laki-laki/Perempuan (coret yang tidak perlu)**

Pendidikan : **SMA-D3-S1-S2... (coret yang tidak perlu/sebutkan lainnya)**

Instansi Penempatan Kerja :

Jabatan :

Lama Bekerja : Tahun

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah data diri anda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Identitas dan isi jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiannya.
3. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia

Masing-masing pilihan jawaban memiliki makna sebagai berikut:

- SS : Apabila jawaban tersebut menurut anda sangat setuju
 S : Apabila jawaban tersebut menurut anda setuju
 R : Apabila jawaban tersebut menurut anda ragu-ragu
 TS : Apabila jawaban tersebut menurut anda tidak setuju
 STS : Apabila jawaban tersebut menurut anda sangat tidak setuju

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)						
NO	Pernyataan	Skala				
		SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Kemampuan					
	Saya mampu menjalankan fungsi laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan.					
2.	Saya mengerti dan mengetahui dengan benar Standar Akuntansi Pemerintah					
3.	Berwawasan					
	Pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang saya miliki cukup luas					
4.	Kepandaian					
	Saya mengerti benar tentang akuntansi					
5.	Saya mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi satu laporan keuangan					

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)						
NO	Pernyataan	Skala				
		SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)
	Pengetahuan					

1.	Saya selalu berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai SAP dan merealisasikannya pada Laporan Keuangan					
2.	Pengetahuan yang saya dapatkan melalui teman, internet, buku dan lain-lain akan meningkatkan efisiensi instansi tempat saya bekerja					
3.	Keterampilan Saya selalu termotivasi pada apa yang saya lihat dan dengarkan sehingga saya dapat merealisasikannya pada pekerjaan yang sedang saya kerjakan					
4.	Dalam kehidupan kita selalu mempunyai pengalaman entah itu baik dan buruk. Dan saya selalu menjadikan pengalaman yang saya sapatkan sebagai pelajaran sehingga saya dapat mengantisipasi senuah tindakan yang akan saya ambil					
5.	Sikap/ Perilaku Orang tua saya selalu mengajarkan sopan santun dan etika kepada saya sehingga saya merealisasikannya pada tempat saya bekerja					

Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
NO	Pernyataan	Skala				
		SS (5)	S (4)	R (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Kompetensi SDM Saya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pegawai dalam bidang keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan					
2.	Untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang berkompeten					
3.	Teknologi Informasi Semua yang berhubungan dengan laporan keuangan dikerjakan menggunakan sistem computer					
4.	Computer sangat berpengaruh terhadap tugas-tugas yang saya kerjakan					
	Peran PPK-SKPD					

5.	Pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD ditetapkan oleh kepala SKPD					
6.	Menurut PP 58 Tahun 2005 pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/ Daerah					
7.	Rekonsiliasi Upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel					
8.	Rekonsiliasi digunakan dalam laporan keuangan bertujuan untuk pencocokan data transaksi data keuangan					
9.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) Dalam pembuatan laporan keuangan bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi					
10.	SPI bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel					

Lampiran 2

TABEL FREQUENCY KARAKTER RESPONDEN

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Jenis Kelamin	1	2.4	2.4	2.4
Laki-laki	17	41.5	41.5	43.9
Perempuan	23	56.1	56.1	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pendidikan	1	2.4	2.4	2.4
S1	28	68.3	68.3	70.7

S2	11	26.8	26.8	97.6
SMA	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Instansi Penempatan Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Asisten Administrasi Umum	1	2.4	2.4	2.4
Asisten Perekonomian dan Kesra	1	2.4	2.4	4.9
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	2.4	2.4	7.3
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	1	2.4	2.4	9.8
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	2.4	2.4	12.2
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	2.4	2.4	14.6
Badan Pendapatan Daerah	1	2.4	2.4	17.1
Badan Penelitian dan Pengembangan	1	2.4	2.4	19.5
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	2.4	2.4	22.0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2.4	2.4	24.4
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	2.4	2.4	26.8
Dinas Kesehatan	1	2.4	2.4	29.3
Dinas Ketahanan Pangan	1	2.4	2.4	31.7
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	2.4	2.4	34.1
Dinas Koperasi dan UKM	1	2.4	2.4	36.6
Dinas Lingkungan Hidup	1	2.4	2.4	39.0

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	2.4	2.4	41.5
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	2.4	2.4	43.9
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	2.4	2.4	46.3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	2.4	2.4	48.8
Dinas Pemuda dan Olahraga	1	2.4	2.4	51.2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu	1	2.4	2.4	53.7
Dinas Pendidikan	1	2.4	2.4	56.1
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	1	2.4	2.4	58.5
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	2.4	2.4	61.0
Dinas Perhubungan	1	2.4	2.4	63.4
Dinas Perikanan dan Kelautan	1	2.4	2.4	65.9
Dinas Perkebunan dan Peternakan	1	2.4	2.4	68.3
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	2.4	2.4	70.7
Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan	1	2.4	2.4	73.2
Dinas PU dan Penataan Ruang	1	2.4	2.4	75.6
Dinas Sosial	1	2.4	2.4	78.0
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural	1	2.4	2.4	80.5
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	2.4	2.4	82.9
Inspektorat	1	2.4	2.4	85.4
Instansi Penempatan Kerja	1	2.4	2.4	87.8

Satpol PP	1	2.4	2.4	90.2
Sekretaris Dewan	1	2.4	2.4	92.7
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1	2.4	2.4	95.1
Staf Ahli Bidang Kesra dan Sosial	1	2.4	2.4	97.6
Staf Ahli Bidang Pemerintahan	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Bendahara	10	24.4	24.4	24.4
Bendahara Pengeluaran	7	17.1	17.1	41.5
Jabatan	1	2.4	2.4	43.9
Kasubag Keuangan	16	39.0	39.0	82.9
Staf Keuangan	7	17.1	17.1	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Lama Bekerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 10 Tahun	5	12.2	12.2	12.2
12 Tahun	2	4.9	4.9	17.1
13 Tahun	2	4.9	4.9	22.0
15 Tahun	3	7.3	7.3	29.3
18 Tahun	1	2.4	2.4	31.7
2 Tahun	1	2.4	2.4	34.1
20 Tahun	5	12.2	12.2	46.3
21 Tahun	1	2.4	2.4	48.8

22 Tahun	1	2.4	2.4	51.2
23 Tahun	1	2.4	2.4	53.7
30 Tahun	1	2.4	2.4	56.1
32 Tahun	2	4.9	4.9	61.0
4 Tahun	1	2.4	2.4	63.4
5 Tahun	4	9.8	9.8	73.2
6 Tahun	1	2.4	2.4	75.6
7 Tahun	3	7.3	7.3	82.9
8 Tahun	5	12.2	12.2	95.1
9 Tahun	1	2.4	2.4	97.6
Lama Bekerja	1	2.4	2.4	100.0
Total	41	100.0	100.0	

Lampiran 3

**TABEL FREQUENCY Variabel BEBAS Pemahaman Standar Akuntansi
Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Statistics

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5
N Valid	40	40	40	40	40
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4.2500	4.3500	4.2500	4.2500	4.3250

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	5.0	5.0	5.0
4.00	26	65.0	65.0	70.0
5.00	12	30.0	30.0	100.0

Total	40	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	4	10.0	10.0	10.0
4.00	18	45.0	45.0	55.0
5.00	18	45.0	45.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	5.0	5.0	5.0
4.00	26	65.0	65.0	70.0
5.00	12	30.0	30.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	5.0	5.0	5.0
4.00	26	65.0	65.0	70.0
5.00	12	30.0	30.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	2	5.0	5.0	5.0
4.00	23	57.5	57.5	62.5

	5.00	15	37.5	37.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Statistics

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5
N	Valid	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.3000	4.1250	4.2000	4.2500	4.2500

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	5.0	5.0	5.0
	4.00	24	60.0	60.0	65.0
	5.00	14	35.0	35.0	100.0
Total		40	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	17.5	17.5	17.5
	4.00	21	52.5	52.5	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
Total		40	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	10.0	10.0	10.0
	4.00	24	60.0	60.0	70.0

	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	5.0	5.0	5.0
	4.00	26	65.0	65.0	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	5.0	5.0	5.0
	4.00	26	65.0	65.0	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 4**TABEL FREQUENCY Variabel TERIKAT Kualitas Laporan Keuangan****Statistics**

		Yno.1	Yno.2	Yno.3	Yno.4	Yno.5	Yno.6	Yno.7
N	Valid	40	40	40	40	40	40	40
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.4250	4.4500	4.2500	4.3500	4.1500	4.1500	4.1250

Statistics

		Yno.8	Yno.9	Yno.10
N	Valid	40	40	40
	Missing	0	0	0
Mean		4.4000	4.4500	4.4000

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.5	2.5	2.5
	4.00	21	52.5	52.5	55.0
	5.00	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.5	2.5	2.5
	4.00	20	50.0	50.0	52.5
	5.00	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	5.0	5.0	5.0
	4.00	26	65.0	65.0	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	4	10.0	10.0	10.0
	4.00	18	45.0	45.0	55.0
	5.00	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	5.0	5.0	5.0
	4.00	30	75.0	75.0	80.0
	5.00	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	2	5.0	5.0	5.0
	4.00	30	75.0	75.0	80.0
	5.00	8	20.0	20.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	7	17.5	17.5	17.5
	4.00	21	52.5	52.5	70.0
	5.00	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.5	2.5	2.5
	4.00	22	55.0	55.0	57.5
	5.00	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.5	2.5	2.5
	4.00	20	50.0	50.0	52.5
	5.00	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Y10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.5	2.5	2.5
	4.00	22	55.0	55.0	57.5
	5.00	17	42.5	42.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 5

TABEL output VALIDITAS

Validitas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

		Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)
X1.1	Pearson Correlation	.940**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
X1.2	Pearson Correlation	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
X1.3	Pearson Correlation	.940**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	40
X1.4	Pearson Correlation	.940**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
X1.5	Pearson Correlation	.631**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	40

Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

		Career Development (Pengembangan Karir) (X)
X1.1	Pearson Correlation	.536**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
X1.2	Pearson Correlation	.798**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
X1.3	Pearson Correlation	.609**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	40
X1.4	Pearson Correlation	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
X1.5	Pearson Correlation	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	40

Validitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

		Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Y No.1	Pearson Correlation	.572**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.2	Pearson Correlation	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.3	Pearson Correlation	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.4	Pearson Correlation	.759**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.5	Pearson Correlation	.536*
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.6	Pearson Correlation	.536**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.7	Pearson Correlation	.726**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.8	Pearson Correlation	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.9	Pearson Correlation	.711**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Y No.10	Pearson Correlation	.772**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	40
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	40

Lampiran 6

TABEL OUTPUT REALIBILITAS

Realibilitas Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.906	5

Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	5

Realibilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	10

Lampiran 7

TABEL OUTPUT REGRESI LINEAR BERGANDA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.883 ^a	.779	.768	1.86733	2.048

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	456.084	2	228.042	65.399	.000 ^b
	Residual	129.016	37	3.487		
	Total	585.100	39			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.581	3.069		3.121	.003

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.867	.204	.548	4.252	.000
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	.710	.240	.381	2.954	.005

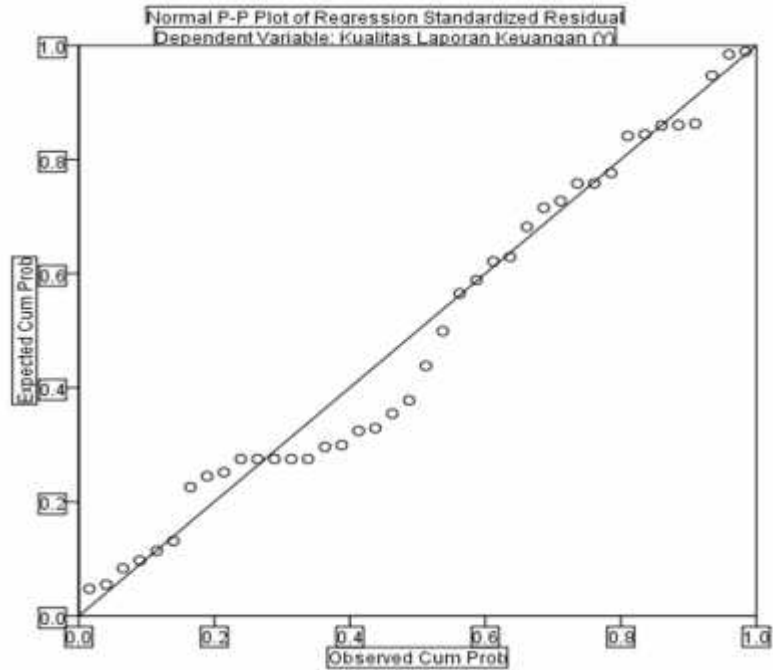
Coefficients^a

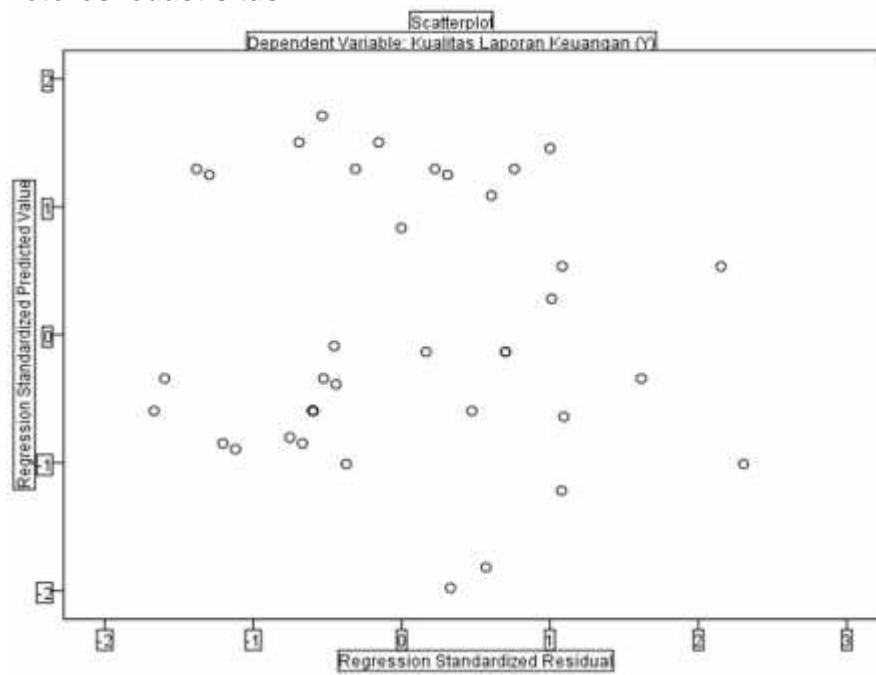
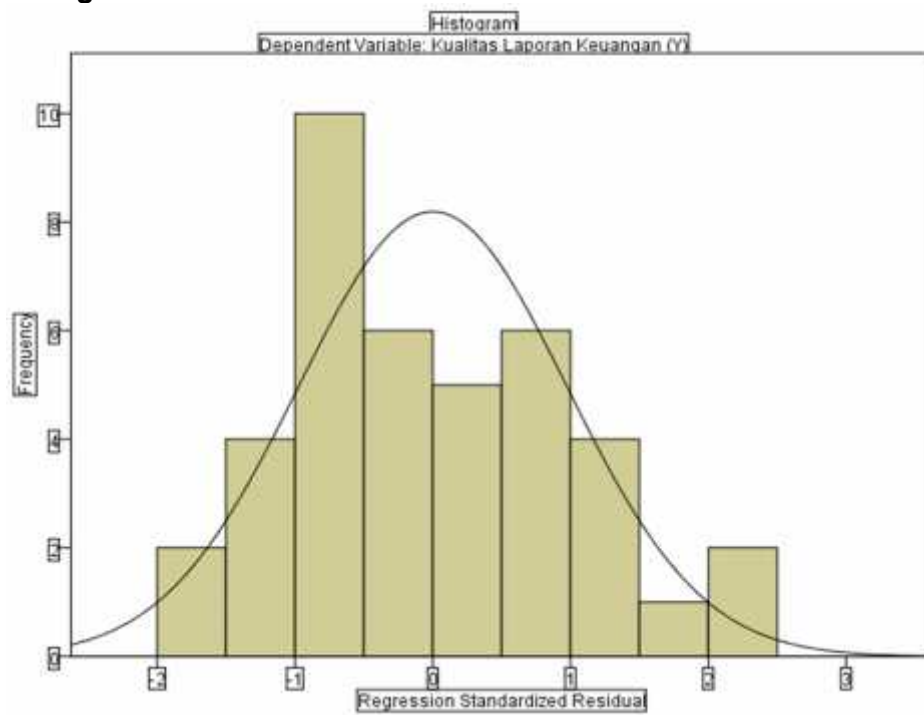
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.359	2.788
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)	.359	2.788

Lampiran 8

NORMALITAS, HETEROSKEDASTISITAS dan HISTOGRAM


a. Normalitas



b. Heteroskedastisitas**c. Histogram**

Lampiran 9

Surat Balasan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Masjid Raya No. 30, Telepon: 884637, Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 27 Agustus 2018

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD Se-Kab. Gowa

Nomor : 070/1571/BKB.P/2018
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Di-
Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 4763/S.01/PTSP/2018 tanggal 09 Agustus 2018 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **APRILIANA SUKWAR**
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 April 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Tamalilang


Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN GOWA**"

Selama : 20 Agustus s/d 20 September 2018
Pengikot : Tidak Aita

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Meniaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN, T
Pangkat : Pembina Utama Muda
N.T.P. : 19600124 197911 001

Tembusan :
1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LPPM UNISMUH Makassar. ;
3. Yang bersangkutan;
4. ~~Perihal~~

Lampiran 10

Distribusi r Tabel

(Distribusi r Tabel)

df = (N-k)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.025	0.025	0.025	0.025	0.05
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.05	0.05	0.05	0.05	0.1
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601

47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Lampiran 11

Distribusi t Tabel

(Distribusi t Tabel)

Pr df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127

42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141

Lampiran 12

Distribusi F Tabel

(Distribusi F Tabel)

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16

31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05

BIOGRAFI PENULIS



Apriliana Sukwar panggilan April lahir di Ujung Pandang pada tanggal 11 April 1996 dari pasangan suami istri Bapak Sukri Sukardi dan Ibu Waryati. Peneliti adalah anak ke-dua dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Tamala'lang desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri TAENG lulus tahun 2008, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Makassar lulus tahun 2011, kemudian setelah lulus melanjutkan pendidikan di SMK YAPIP Makassar Sungguminasa lulus tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.